

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Hasil Penelitian	20
E. Kerangka Berpikir	21
F. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI.....	33
A. Landasan Hukum Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia.....	33
1. Prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia	33
2. Jenis-Jenis Alat Bukti yang Sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	38
3. Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	40
4. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	43
5. Pembuktian Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	53
B. Peraturan Internasional Terkait <i>Cybercrime</i>	60
1. Regulasi Internasional dalam Penanganan <i>Cybercrime</i>	60
2. Konvensi dan Regulasi Internasional yang Mengatur <i>Cybercrime</i>	63

3. Perbandingan Peraturan Negara Lain dengan Hukum Indonesia dalam Pembuktian <i>Cybercrime</i>	67
C. Masalah <i>Cybercrime</i> di Indonesia dan Internasional	71
1. Masalah <i>Cybercrime</i> di Indonesia	71
2. Masalah <i>Cybercrime</i> Internasional.....	75
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	83
A. Pendekatan dan Metodologi Penelitian	83
1. Jenis Penelitian.....	83
2. Metode Pendekatan	83
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	84
1. Jenis Data	84
2. Sumber Data.....	85
C. Teknik Pengumpulan Data	87
1. Studi Lapangan (<i>Field Research</i>).....	87
2. Analisis Dokumen.....	88
D. Teknik Analisis Data	89
E. Lokasi Penelitian.....	90
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	91
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Ditres Siber Polda Jawa Barat	91
1. Sejarah Singkat Berdirinya Ditreskrimsus Polda Jabar	91
2. Profil, Tugas Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jabar	91
3. Struktur Organisasi dan Kewenangan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jabar	93
4. Kewenangan Ditres Siber Polda Jabar	93
B. Pembahasan Hasil Penelitian	94
1. Pembuktian Tindak Pidana <i>Cracking</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	94
2. Cara Menjaga Keabsahan Barang Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana <i>Cracking</i> di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat....	120

3. Analisis Validitas Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana <i>Cracking</i>	127
BAB V PENUTUP	136
A. Simpulan	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	149



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alur Konsrvasi Barang Bukti Elektronik.....	108
--	------------

